

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka

Mochamad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Memahami dan Mengerti HIR., Badan Penerbit UNDIP 2008.

Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. VII.

### 2. Jurnal

Fajarrudin, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Ima Erlie Yuana, "Tanggungjawab notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris", *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.

M. Edwin Azhari and others, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian... Vol 5 No 1 Januari 2018', 5.1 (2018), 43–50.

Rafiq Adi Wardana, 'Pembatalan Akta Jual Beli Ppat Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) Rafiq', *Repository UGM*, 17, 2015, 1–15 Vol. 3 No.2 Tahun 2021. E-ISSN: 2623-2928 215 <<http://etd.repository.ugm.ac.id>>.

Valerio Xaverius Tjipto, 'Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No.16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)', *Recital Review*, 2 (2020), 65.

## **1. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri agrarian Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.